

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah hak semua warga Negara Indonesia dan kewajiban Negara untuk memastikan semua warganya dapat menempuh pendidikan sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Pendidikan itu sendiri tak lepas dari biaya. Pepatah kuno mengatakan *jer basuki mowo beo*. Semua hasil akan dapat capai jika mau mengeluarkan biaya.

Di era sekerang tak ada yang gratis. Semua serba mahal. Tak kecuali dengan pendidikan. Biaya pendidikan yang tinggi menjadi kendala masyarakat untuk menyekolahkan putra/putrinya sampai level yang tinggi. Disini pemerintah hadir untuk menjawab masalah tersebut.

Keuangan pendidikan harus memadai dalam memastikan semua siswa mendapatkan pendidikan dasar berkualitas tinggi. Standar pendidikan dasar di setiap negara berbeda dan biaya untuk mencapai standar akan berbeda pula hal itu dikarenakan setiap negara di dunia memiliki tujuan dan standar pendidikan tersendiri, hampir semua negara memiliki perhatian yang sama, yaitu memastikan sistem keuangan sekolah menyediakan sumber daya yang memadai untuk mengembangkan warga negara agar kreatif dan sukses dalam kehidupannya.

Pendidikan sangat tergantung kepada manajemen tata kelola yang ada di dalam sekolah. Negara hadir dalam program yang bernama Bantuan Operasional Sekolah sebagai jawaban membantu semua sekolah baik sekolah negeri maupun

swasta dari level pendidikan dasar sampai pendidikan menengah untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam bersekolah. Setiap sekolah di Negara Indonesia mendapatkan Bantuan Operasioanal Sekolah. Kebijakan ini bertujuan untuk menggratiskan biaya sekolah yang terus mengalami kenaikan.

Pengelolaan BOS disetiap sekolah haruslah sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh pemerintah. Pengelolaan tersebut meliputi rencana penggunaan anggaran, pelaksanaan penggunaan anggaran dan pelaporan penggunaan anggaran. Ketiga hal diatas sudah diatur dalam juklak dan juknis BOS terbaru. Kegiatan dan item pembiayaan apa saja yang dapat dibiayai oleh dana BOS tertuang disana. Sekolah tinggal melaksanakan apa yang sudah titetapkan tersebut.

BOS sebagai bagian dari usaha nyata yang dilakukan pemerintah dalam bidang keuangan diharapkan mampu mengatasi keuangan sekolah. Biaya sekolah ynag semula besar dan berakibat kecilnya tingkat partisipasi masyarakat dalam bersekolah menjadi meningkat. Tingkat kesadaran masyarakat yang kecil dalam menyekolahkan putra putrinya menjadi lebih besar dengan adanya BOS.

Biaya yang mahal adalah momok bagi masyarakat menengah-kebawah. Kebutuhan akan pembelian buku tulis, buku paket serta perlengkapan sekolah lain adalah factor utama kecilnya minat masyarakat dalam bersekolah. BOS sebagai solusi cerdas pemangku kepentingan dalam pengelolaan pendidikan khususnya dalam bidang keuangan. Anggaran yang sangat besar itu diharapkan dapat menjamin kelangsungan hidup siswa miskin dalam menyekolahkan putra-putrinya.

BOS yang merupakan program dari pemerintah pusat tentunya membutuhkan manajemen dalam pengelolaannya. Mulai dari manajemen penganggaran, manajemen penggunaannya serta manajemen pelaporan. Manajemen tersebut di buat dari hulu ke hilir. Mulai dari tingkat pusat maupun tingkat bawahnya sampai ke sekolah yang merupakan penerima anggaran.

Dari tingkat pusat sebelum BOS dicairkan terlebih dahulu pemerintah pusat mengeluarkan juknis BOS sebagai bahan acuan sekolah dalam mengelola BOS. Didalam juknis tersebut terdapat item-item yang terinci sedemikian rupa apa saja yang dapat dan tidak dapat dibiayai oleh BOS. Sekolah tinggal melaksanakan apa yang ada di dalam juknis tersebut.

Di dalam juknis juga terdapat jadwal pencairan anggaran dari pusat ke sekolah. Mulai dari triwulan pertama sampai ke triwulan ke empat. Masing-masing triwulan dengan angka yang berbeda-beda tergantung kegiatan apa saja yang ada di triwulan tersebut. Sekolah tinggal melaksanakan apa yang sudah tersedia di juknis BOS.

Sistem pelaporan BOS juga sudah terdapat di dalam juknis BOS tersebut. Contoh pelaporan untuk dinas pendidikan, untuk direktorat maupun BPK. Baik itu pelaporan *online* maupun pelaporan *off line*. Lagi-lagi sekolah sebagai penerima dan pengelola BOS tingkat bawah tinggal melaksanakan juknis yang di sediakan oleh pusat.

Juknis BOS dibuat oleh pemerintah pusat tiap tahun berganti dimaksudkan untuk memudahkan sekolah dalam mengelola BOS mulai dari perencanaan penggunaan anggaran, pelaksanaan penggunaan anggaran maupun pelaporan

penggunaan anggaran. Lebih jauh dari itu, pemerintah juga mengikut sertakan pengelola BOS di sekolah dalam berbagai pelatihan. Pelatihan tersebut dimaksudkan untuk menyamakan persepsi bendahara BOS dalam melaporkan penggunaan dana BOS tiap triwulanya.

Akan tetapi segala hal yang dilakukan pemerintah dalam memudahkan manajemen BOS disekolah belum semuanya dapat mengatasi kendala penggunaan dan pelaporan BOS di sekolah. Banyak sekali kendala di lapangan yang terjadi dalam pengelolaan dana BOS di tingkat sekolah yang luput dari perhatian pemerintah.

Kendala pertama, pihak sekolah yang dalam hal ini adalah penerima dan pengguna dana BOS belum siap dalam memenejemen dana BOS ditingkat sekolah. Sekolah harus mempersiapkan dulu SDM, sarana dan prasarana dalam mengelola dana BOS tersebut. SDM sekolah yang mengelola dana BOS dalam panelitian penulis kebanyakan merupakan guru mapel yang diberi tugas tambahan oleh kepala sekolah sebagai bendahara dana BOS sehingga sering dalam mengelola dana BOS kurang fokus karena harus membagi antara mengajar dan mengelola BOS.

Kendala kedua, penggunaan bantuan pemerintah belum dapat mengatasi seluruh biaya yang timbul dalam pendidikan. Biaya operasional hanya sebatas dapat digunakan untuk item tertentu yang di tentukan oleh pemerintah saja seperti pembelian alat tulis kantor, pemeliharaan komputer, pembelian buku ajar dan kegiatan ekstra kurikuler. Gaji guru di Juknis BOS untuk sekolah negeri sangat

kecil yaitu maksimal 15 % dari total BOS yang diterima sekolah (Permendikbud Nomor 26 Tahun 2017 tentang Juknis BOS 2017).

Kendala ketiga, ketidak pastian pencairan dana BOS kepada sekolah. Kendala ini sangat sering terjadi. Seharusnya pencairan dana BOS sebelum atau paling tidak di awal bulan di triwulan tersebut. Tetapi kenyataan dilapangan, pencairan dana BOS sering sekali terlambat. Misalnya BOS triwulan 1 (Januari-Maret) seharusnya cair pada bulan Desember atau sebelum dana tersebut digunakan. Atau setidaknya-tidaknya cair pada awal bulan Januari. Tapi dalam kenyataannya BOS triwulan 1 sering sekali cair pada bulan Maret akhir atau bahkan April. Hal ini berakibat terhambatnya kegiatan di sekolah. Dana sekolah yang harusnya bisa dibiayai BOS pada bulan Januari baru bisa terealisasi pada bulan April saat BOS sudah cair.

Kendala keempat, sering bergantinya juknis BOS yang dikeluarkan pemerintah. Hal ini berakibat pelaporan BOS di tiap triwulan menjadi terhambat. Bendahara BOS yang dalam prosesnya sudah bekerja dalam melaporkan dana BOS sesuai dengan juknis harus merevisi kembali pekerjaannya di sesuaikan dengan juknis BOS yang terbaru. Tak jarang bendahara BOS harus mengulangi dari awal pekerjaannya.

Kendala kelima, pelaporan dana BOS yang diminta oleh diknas, inspektorat maupun BPKD berbeda-beda. Ketiga pihak yang berbeda itu seringkali meminta pelaporan BOS kepada bendahara dengan format yang berbeda dalam waktu yang *relative* bersamaan. Hal ini sangat sering terjadi dan sangat memberatkan bendahara sekolah.

Sekolah yang dalam naungan pemerintah (sekolah negeri) dalam mengelola keuangan sangat bergantung kepada dana BOS. Sekolah negeri tidak diperkenankan untuk menarik dana lain kepada orang tua siswa. Mereka hanya diperbolehkan untuk mengelola keuangan yang berasal dari BOS saja. Hal ini menimbulkan problematika di sekolah negeri.

Selain dari pada itu, sekolah negeri dalam melaporkan dana BOS harus sesuai dengan petunjuk yang ada. Tidak boleh satu rupiah pun pengelolaan dana BOS di sekolah negeri berbeda dari juklak/juknis BOS jika tidak mau bermasalah dalam pelaporannya. Satu rupiah yang berbeda bisa berakibat fatal di sekolah negeri. Pengelolaan yang kaku tersebut membuat problem tersendiri di lingkungan sekolah negeri.

Pelaporan BOS di sekolah negeri saringatlah ketat. Tiap tiga bulan sekalipun harus melaporkan dana BOS ke dinas pendidikan maupun online. Selain itu juga ada pemeriksaan juga dari inspektorat dan BPKP. Berbeda dengan sekolah swasta yang pelaporan dana BOS hanya kepada Dinas Pendidikan dan online.

Problematika di sekolah negeri dan swasta dalam pengelolaan dana BOS ada kesamaan yaitu kebanyakan bendahara BOS di sekolah negeri dan swasta di kecamatan kedawung merupakan guru mata pelajaran. Hal ini berakibat kurang konsentrasinya dalam mengelola keuangan BOS. Selain itu juga keterlambatan pencairan dana BOS juga menjadi masalah yang besar di sekolah negeri dan swasta yang penulis teliti.

Penggunaan dana BOS di sekolah swasta 50 % untuk gaji guru dan karyawan. Selebihnya digunakan untuk operasional sekolah. Hal ini menimbulkan kekurangan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu untuk menutupi kekurangan operasional sekolah tersebut sekolah swasta membebankanya kepada orang tua siswa dengan menarik dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dengan besaran tiap sekolah berbeda-beda sesuai dengan kesepakatan orang tua siswa, komite dan pihak sekolah.

Pelaporan dana BOS di sekolah swasta tak seketat sekolah negeri. Dana BOS di sekolah swasta lebih tepat disebut dengan dana hibah. Sekolah swasta dalam melaporkan penggunaan dana BOS cukup kepada dinas pendidikan saja serta di *online* kan di web BOS Online.

Peneliti disini membandingkan pengelolaan dana BOS di sekolah negeri dan swasta di SMP se-Kecamatan Kedawung mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporanya. Penulis memilih tempat di Kedawung karena jarak tempat tinggal peneliti yang dekat. Selain itu dikarenakan Kecamatan Kedawung memiliki SMP yang lumayan banyak dan cocok sebagai soyek peneliti yakni ada 2 SMP negeri dan 3 SMP Swasta.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengelolaan dana BOS di SMP Negeri se-Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen?
2. Bagaimanakah pengelolaan dana BOS di SMP Swasta se-Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen?

3. Masalah dan solusi apa yang timbul dari Pengelolaan Dana BOS di SMP Negeri dan Swasta se-Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen?

C. Tujuan Masalah

1. Mendeskripsikan pengelolaan dana BOS di SMP Negeri se-Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen.
2. Mendeskripsikan pengelolaan dana BOS di SMP Swasta se-Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen.
3. Mendeskripsikan masalah dan solusi apa yang timbul dari Pengelolaan Dana BOS di SMP Negeri dan Swasta se-Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

- a. Untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan membuat laporan penelitian secara ilmiah dan sistematis.
- b. Menambah wawasan bagi pembaca tentang pengelolaan dana BOS di SMP Negeri se-Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen.
- c. Menambah wawasan bagi pembaca tentang pengelolaan dana BOS di SMP Swasta se-Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen.

- d. Menambah wawasan bagi pembaca tentang masalah dan solusi apa yang timbul akibat Pengelolaan Dana BOS di SMP Negeri dan Swasta se-Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk Sekolah

- 1) Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sarana diagnosis dalam mencari solusi dalam keterbatasan penggunaan dana BOS.
- 2) Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan anggaran operasional di sekolah masing-masing.
- 3) Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengangkatan karyawan khusus dalam pengelolaan BOS.

b. Untuk Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai evaluasi untuk lebih meningkatkan kualitas pengelolaan BOS dimasa yang akan datang.

c. Untuk Guru

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk referensi dan bahan bacaan yang bermanfaat untuk dunia pendidikan.

d. Untuk Orang Tua Siswa

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan perenungan diri bahwa pentingnya pembiayaan dalam pendidikan.